

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM juga bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. yang harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Keberadaan UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa maupun kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah dalam bentuk pajak. UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*unbankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi (Situmorang, 2008).

UMKM perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan (RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi).

Peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas

proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri. (RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi).

UMKM Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia yang terus berkembang dengan pesat. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) juga dapat menyerap hasil pertanian (bahan baku) dalam negeri, serta dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, merupakan pasar yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia, mudah dilakukan oleh masyarakat karena penggunaan teknologi proses yang sederhana serta menyerap tenaga kerja (Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2011).

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, antara lain: pengembangan UMKM kawasan pariwisata/kawasan agribisnis, pembinaan Sentra/Kawasan produk kerajinan UMKM, bantuan Pendaftaran Merk/Halal, Haki, Promosi melalui pameran dan media on line, penerbitan izin usaha mikro dan kecil, mendorong dan memfasilitasi akses KUR, Registrasi PKL, bantuan kemasan dan *branding* produk, pelatihan bagi UMKM, dll. (Renstra Tahun 2016-2021, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat).

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan

masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan (UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM).

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih membutuhkan penanganan untuk berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Permasalahan umum yang perlu dicermati antara lain adalah kapasitas SDM, serta kontribusi yang terbatas. Kondisi ini juga menunjukkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah, partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar (Prabowo dan Wardoyo, 2003).

Menurut Ansharullah (2017), permasalahan terbesar dari perkembangan UMKM yakni lemahnya strategi pemasaran, peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam produksi masih teknologi tradisional atau sangat sederhana juga masih kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola usaha secara bisnis sehingga peluang-peluang pasar belum diisi secara optimal. Prasetyo (2008) menambahkan, peran pemerintah belum optimal dalam pengembangan UMKM dari segi SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha seperti, rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah karena koordinasi dan sinergi baik dalam pelaksanaan, pemantauan kebijakan dan program belum dilaksanakan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha. Kebijakan juga diperlukan untuk memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM, teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Usaha kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM.

## B. Masalah Penelitian

Keberadaan Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sumatera Barat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Tingkat pertumbuhan produksi IMK di Sumatera Barat cenderung meningkat sejak tahun 2015 (Lampiran 1) dari 1,92% pada tahun 2015 menjadi 7,7% pada tahun 2019 walaupun terjadi penurunan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tercatat sejumlah 108.588 usaha IMK di Sumatera Barat, yang memberikan lapangan pekerjaan kepada 202.330 orang tenaga kerja dengan nilai upah dan balas jasa mencapai Rp.1,3 triliun (BPS, 2019). Sebagian besar IMK di Sumatera Barat yaitu sebanyak 40.544 usaha bergerak pada industri makanan, sehingga Sumatera Barat terkenal dengan berbagai jenis kuliner yang mengandung banyak bumbu-bumbu dan mempunyai citarasa tinggi. Kuliner ini berupa makanan ringan dan minuman (rendang, produk makanan ringan dari umbi-umbian). Produk makanan ringan dari umbi-umbian diproduksi hampir di seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Barat di antaranya Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Renstra 2016-2021 UMKM Sumbar). Data dari Disperindag Sumbar (2019) menunjukkan bahwa dari industri kecil dan menengah produk makanan kerupuk dan sejenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2016 usaha IKM ini didominasi oleh usaha kerupuk Matahari sebanyak 58 unit usaha dan usaha Rubik Ganepo sebanyak 21 unit usaha (Lampiran 2). Salah satu daerah yang dijadikan Sentra Industri Kecil dan Menengah olahan Ubi Kayu (Rubik Ganepo) di Kabupaten Lima Kota adalah Padang Kandih Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak. Usaha Rubik Ganepo berkembang cukup signifikan, dari 13 unit usaha pada tahun 2013 meningkat menjadi 21 unit usaha pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 30 unit usaha. Selama 5 tahun terakhir terjadi rata-rata peningkatan produksi sebesar 11% dan pertumbuhan modal sebesar 22%, yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Banyaknya produksi akan berdampak kepada kebutuhan akan bahan baku juga meningkat. Untuk memproduksi Rubik Ganepo sebanyak 15.540 kg per minggu dibutuhkan ubi kayu per minggu sebanyak 38.200 kg (Lampiran 4). Hal ini memperlihatkan bahwa usaha Rubik Ganepo mempunyai potensi yang besar untuk berkembang, yang pada akhirnya

akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya Nagari Padang Kandih. Adanya potensi pengembangan usaha Rubik Ganepo dilihat dari perkembangan produksi dan modal maka perlu diteliti sejauh mana peran usaha Rubik Ganepo di Jorong Padang Kandih, Nagari VII Koto talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perekonomian keluarga.

Dari uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran usaha Rubik Ganepo dalam perekonomian keluarga
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam pengembangan usaha Rubik Ganepo di Jorong Padang Kandih?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang diuraikan diatas. Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis peran usaha Rubik Ganepo dalam perekonomian keluarga.
2. Menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan bahan baku, proses produksi, pemasaran usaha Rubik Ganepo di Jorong Padang Kandih

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi untuk pengelolaan UMKM sebagai konsep pembangunan yang handal (*reliable*) dan berkelanjutan (*sustainability development*) terhadap ekonomi keluarga
2. Bagi Pemerintah dapat memberikan masukan sebagai acuan dalam membuat kebijakan untuk pengembangan UMKM .
3. Bagi Peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Pasca Sarjana Pengembangan Wilayah Pedesaan Universitas Andalas.